



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
JL. RAYA PANDEGLANG KM 6,6 SERANG

# LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN

## TAHUN 2019

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten  
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001  
Website : [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id) Email : [humas@pt-banten.go.id](mailto:humas@pt-banten.go.id)  
Serang - 42126

**LAPORAN  
KINERJA**

**PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**2019**

## Kata Pengantar

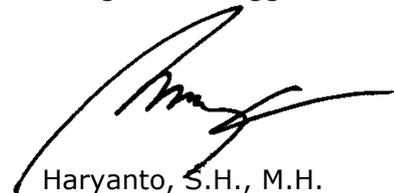
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banten pada tahun anggaran 2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015-2019. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2019 Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang terdiri 6 (enam) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 24 Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Banten,



Haryanto, S.H., M.H.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2019 Pengadilan Tinggi Banten telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikatornya.

Dari ketigabelas indikator tersebut, ada 7 (tujuh) diantaranya yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu berkaitan dengan core bussiness Pengadilan Tingkat Banding dalam menangani perkara hukum. Sedangkan sisanya merupakan indikator kinerja bagian administrasi dan teknologi informasi sebagai pendukung core bussiness.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan

baik (dilihat dari rata-rata capaian 100% atau lebih), yaitu :

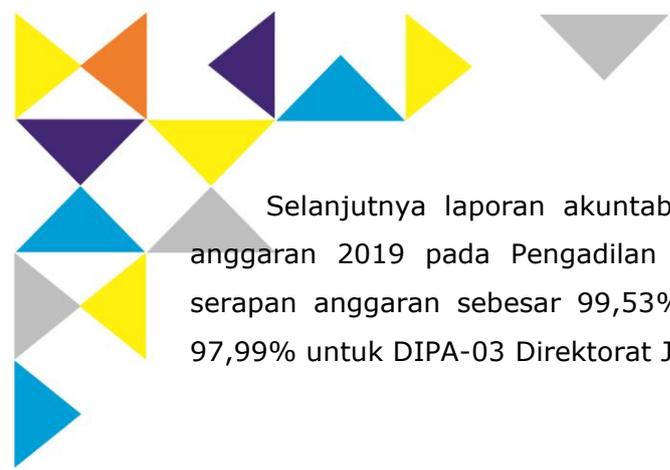
1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan me-nunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, akuntabel.
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten adalah sebesar 97,9%.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2019 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2019 disajikan dalam matriks berikut ini :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana	100%	90,8%	90,8%
		2. Perdata	80%	89,1%	111%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		1. Pidana	80%	-20%	-25%
		2. Perdata	80%	25%	31%
		3. Tipikor	80%	100%	125%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Kasasi	40%	32%	80%
		2. PK	85%	67%	79%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	88,56	98,4%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1				82,5%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2				100%	
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP			
		1. Pidana	90%	90%	100%
		2. Perdata	90%	93%	103%
		3. Tipikor	90%	100%	111%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 3				105%	
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekseternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4				100%	
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase hakim dan panitera pengganti yang lulus diklat yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5				100%	
6.	Meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 6				100%	
<b>Rata-rata keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten</b>				<b>97,9%</b>	



Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Tinggi Banten menunjukkan persentase capaian serapan anggaran sebesar 99,53% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 97,99% untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	2
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	12
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	16
B. Realisasi Anggaran .....	36
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .....	4
Tabel 2	Potensi dan Permasalahan .....	7
Tabel 3	Hubungan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja.....	11
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019 .....	13
Tabel 5	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	16
Tabel 6	Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel .....	18
Tabel 7	Persentase sisa perkara yang diselesaikan .....	19
Tabel 8	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	20
Tabel 9	Persentase penurunan sisa perkara .....	21
Tabel 10	Data perkara .....	22
Tabel 11	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	22
Tabel 12	Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ..	23
Tabel 13	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat Waktu .....	24
Tabel 14	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah putus .....	25
Tabel 15	Sasaran terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel .....	26
Tabel 16	Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP .....	27
Tabel 17	Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optima baik internal maupun eksternal .....	28
Tabel 18	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti .....	29
Tabel 19	Presentase temuan yang ditindaklanjuti .....	30
Tabel 20	Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif .....	31
Tabel 21	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial .....	32
Tabel 22	Persentase Pegawai yang lulus Diklat non Teknis Yudisial .....	33
Tabel 23	Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien .....	34
Tabel 24	Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung Peningkatan pelayanan prima .....	35
Tabel 25	Persentase Realisasi Anggaran .....	36

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .....	18
Grafik 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	20
Grafik 3. Capaian sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara .....	24
Grafik 4. Capaian Sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel .....	27
Grafik 5. Capaian Sasaran terwujudnyapelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.....	29
Grafik 6. Capaian Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.....	32
Grafik 7. Capaian Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien .....	35
Grafik 8. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran .....	37

# BAB I PENDAHULUAN



## A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

### Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi Banten menyelenggarakan fungsi :



### Fungsi Mengadili

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi



### Fungsi Pembinaan

yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan



### Fungsi Pengawasan

yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum



### Fungsi Nasihat

yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta



### Fungsi Administrasi

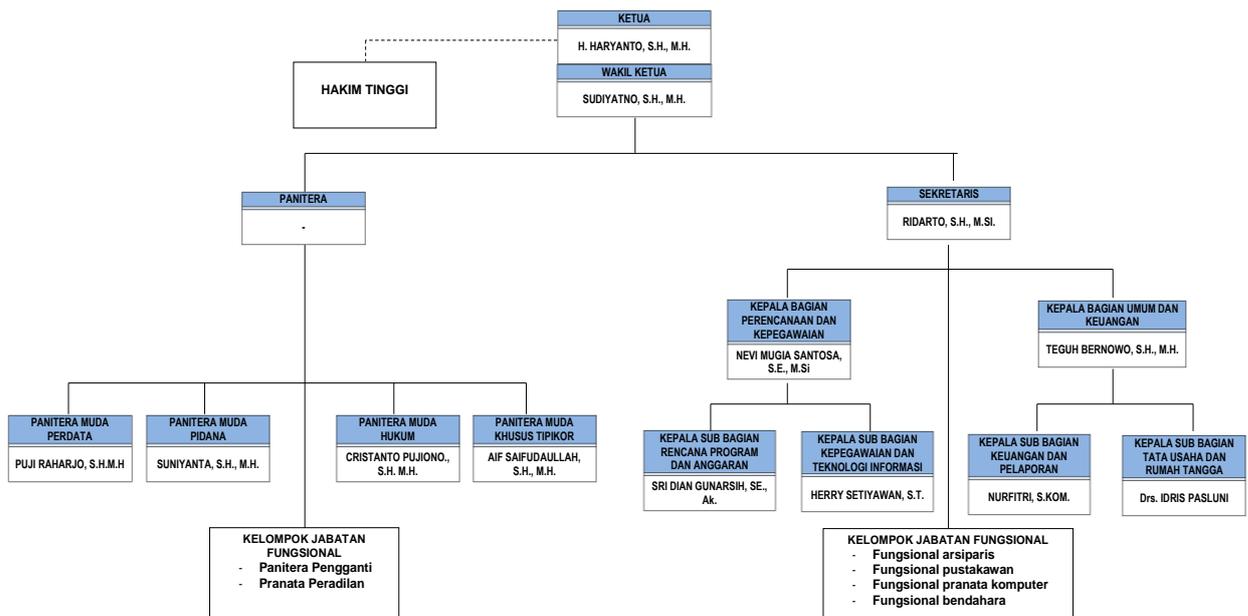
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahinya beserta wilayah hukumnya berikut ini :

Tabel 1. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
2.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

### Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019





## B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banten masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Banten.

### 1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

### 2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Banten telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

### 3. Aspek terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan Teknologi Informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

- 
4. Aspek terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Banten berkewajiban untuk mengawasi 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Banten harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/ P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Permasalahan utama dalam aspek kualitas pengawasan ini, yaitu dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

5. Aspek terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun nonteknis peradilan. Dalam hal penguatan sumberdaya manusia di bidang teknis peradilan maka Pengadilan Tinggi Banten menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga nonteknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

6. Aspek meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada indikator persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Tabel 2. Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
<p>1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;</li> <li>• Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Banten;</li> <li>• Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara;</li> <li>• PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>• Website Pengadilan Tinggi Banten sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan/ peningkatan sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor yang tidak bisa diprediksi setiap tahun;</li> <li>• Informasi putusan di Pengadilan Tinggi Banten yang baru bisa dilihat oleh publik di direktori putusan, sedangkan di aplikasi SIPP belum dapat diakses oleh publik.</li> </ul>
<p>2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan,</li> <li>• SK Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/41/KPT/SK/4/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Banten.</li> <li>• Biaya proses penyelesaian perkara banding perdata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari.</li> <li>• Minimnya biaya perkara perdata sebesar Rp. 150.000,-</li> </ul>
<p>3. Aspek Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi &amp; menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahkamah Agung RI selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).</li> <li>• Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011.</li> <li>• Sarana meja informasi dan teknologi informasi.</li> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya SIPP dengan aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik melalui Website (alamat : pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id)</li> <li>• Ukuran meja PTSP belum sesuai dengan SK Dirjen Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018.</li> </ul>

Potensi	Permasalahan
<p>4. Aspek Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;</li> <li>• Pengadilan Tinggi Banten selalu melakukan asistensi terhadap Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dibawahnya untuk memperbaiki dan mempertahankan Akreditasi yang telah dicapai;</li> <li>• Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>• Dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.</li> </ul>
<p>5. Aspek Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter obyektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia dan kurangnya pengembangan kompetensi ASN.</li> <li>• Belum adanya pola pendidikan dan pelatihan yang berjenjang &amp; berkesinambungan pada tenaga teknis di Pengadilan.</li> </ul>
<p>6. Aspek Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dan kelancaran proses penyelesaian perkara.</li> <li>• Beberapa usulan belanja modal belum dipenuhi oleh Mahkamah Agung.</li> <li>• Penataan organisasi teknis kepaniteraan di Pengadilan menjadi organisasi yang tepat dan terukur.</li> <li>• Organisasi kepaniteraan Pengadilan strukturnya belum sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku (UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara)</li> </ul>

# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**



## A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RenstraK/L) 2015-2019.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Hubungan visi, misi dan tujuan Pengadilan Tinggi Banten digambarkan sebagai berikut :



Dalam mencapai visi dan tujuannya tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dapat diukur oleh 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang 7 (tujuh) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3. Hubungan Tujuan, Rencana Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara Indeks kepuasan pencari keadilan
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan Perbandingan isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
		2. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.
		3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan
		4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan Hakim dan Panitera yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM yang lulus/bersertifikat diklat non teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat
		5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Indikator ini untuk mengukur realisasi pemakaian anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam hal peningkatan dukungan layanan manajemen terhadap standarisasi gedung dan bangunan serta sarana dan prasarana pengadilan.

Keterangan : 7 (tujuh) indikator kinerja pertama merupakan IKU.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebelum menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2019, Pengadilan Tinggi Banten telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019. Dokumen RKT 2019 tersebut sebagaimana pada Lampiran 1.

PKT Tahun 2019 merupakan target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten. Dalam PKT Tahun 2019 ini terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja, di mana 7 (tujuh) indikator urutan pertama merupakan IKU.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		1. Pidana	100 %
		2. Perdata	100 %
		3. Tipikor	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
1. Pidana	100 %		
2. Perdata	80 %		
3. Tipikor	100 %		
c. Persentase penurunan sisa perkara			
1. Pidana	80 %		
2. Perdata	80 %		
3. Tipikor	80 %		
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
1. Kasasi	40 %		
2. PK	85 %		
e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	90 %
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100 %

Keterangan : 7 (tujuh) indikator kinerja pertama merupakan IKU.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Pengadilan Tinggi Banten mendapat dukungan anggaran dari APBN total sebesar Rp.25.091.023.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program.



DIPA 01	Rp. 25.091.023.000,-
DIPA 03	Rp. 165.284.000,-




Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 24.949.023.000,-
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 142.000.000,-
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 165.284.000,-

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	165.284.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	24.949.023.000
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	142.000.000

# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2019 adalah rata-rata sebesar 97,9%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut (7 indikator kinerja urutan pertama adalah IKU):

Tabel 5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana	100%	90,8%	90,8%
		2. Perdata	80%	89,1%	111%
		3. Tipikor	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
		1. Pidana	80%	100%	-25%
2. Perdata	80%	100%	31%		
3. Tipikor	80%	100%	125%		

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Kasasi	40%	32%	80%
		2. PK	85%	67%	79%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	88,56	98,4%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1				82,5%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2				100%	
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP			
		4. Pidana	90%	90%	100%
		5. Perdata	90%	93%	103%
		6. Tipikor	90%	100%	11%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 3				105%	
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4				100%	
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase hakim dan panitera pengganti yang lulus diklat yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5				100%	
6.	Meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 6				100%	
<b>Rata-rata keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten</b>				<b>97,9%</b>	

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :



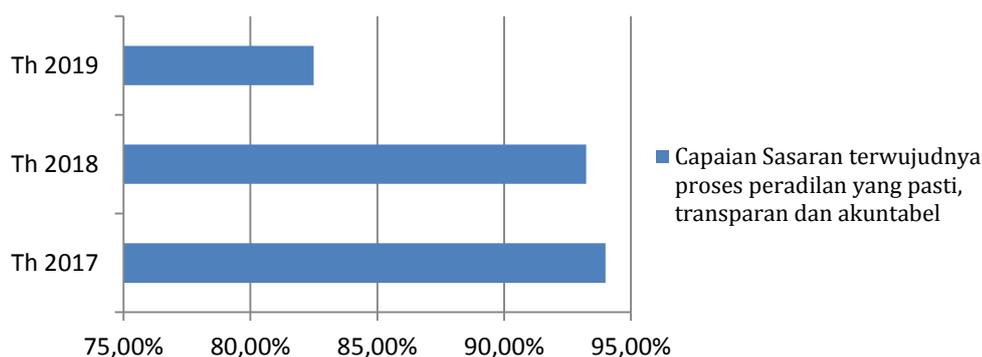
**Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
1. Pidana	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%
3. Tipikor	nihil	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1. Pidana	92%	84,6%	90,8%
2. Perdata	101%	109%	111%
3. Tipikor	-	92,8%	100%
c. Persentase penurunan sisa perkara			
1. Pidana	67%	0%	-25%
2. Perdata	-37%	35,2%	31%
3. Tipikor	-	62,5%	125%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
1. kasasi	102%	132%	80%
2. PK	229%	210%	79%
e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90,9%	92,8%	98,4%
Rata-rata capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	94%	93,23%	82,5%

**Grafik 1. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**



Pada tabel 6 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 82,5% dibandingkan tahun 2018 mencapai 93,23%.

Penurunan ini terutama terjadi dikarenakan terjadinya ketimpangan capaian kinerja pada indikator kinerja ke-4, namun demikian telah target pada matriks renstra telah direviu/ disesuaikan dengan trend/kecenderungan yang terjadi di tahun sebelumnya.

**Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :**

**● Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator kinerja ini untuk menggambarkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2018) yg belum putus dan harus diselesaikan / diputus di tahun 2019 ini.

**Tabel 7. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Tahun	Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	10	10	100%	100%	100%
	Perdata	28	28	100%	100%	100%
	Tipikor	1	1	100%	100%	100%
2018	Pidana	10	10	100%	100%	100%
	Perdata	39	39	100%	100%	100%
	Tipikor	2	2	100%	100%	100%
2017	Pidana	19	19	100%	100%	100%
	Perdata	31	31	100%	100%	100%
	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

- Untuk perkara Pidana, jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2019 adalah 10 perkara, tahun 2018 sejumlah 10 perkara dan tahun 2017 sejumlah 19 perkara, semua bisa diselesaikan/diputus sehingga mencapai target 100%;
- Untuk perkara Perdata, jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2019 adalah 28 perkara, tahun 2018 sejumlah 39 perkara dan tahun 2017 sejumlah 31 perkara semua perkara tersebut diselesaikan/diputus sehingga persentase capaiannya 100%;
- Untuk perkara Tipikor, jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun 2017 nihil dan tahun 2018 sejumlah 2 perkara. Kemudian di tahun 2019 sejumlah 1 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019 sehingga persentase capaian 100%.
- Bahwa secara keseluruhan, indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

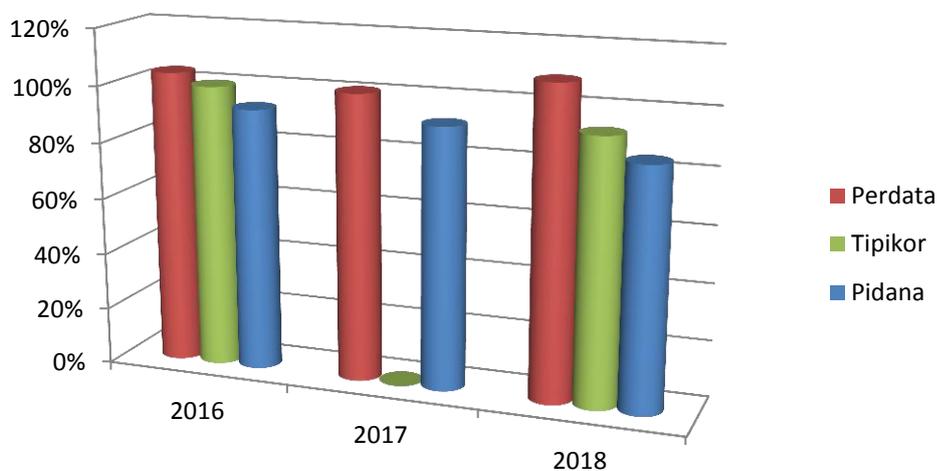
## Indikator kinerja ke-2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara perkara yang diselesaikan (diputus dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan jumlah perkara yang ada.

Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	119	131	90,8%	100%	90,8%
	Perdata	171	192	89,1%	80%	111%
	Tipikor	8	8	100%	100%	100%
2018	Pidana	110	130	84,6%	100%	84,6%
	Perdata	191	219	87,2%	80%	109%
	Tipikor	13	14	92,8%	100%	92,8%
2017	Pidana	120	130	92%	100%	92%
	Perdata	167	206	81%	80%	101%
	Tipikor	0	2	0%	100%	0%

Grafik 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan :

- Untuk perkara Pidana capaian di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Banten dalam menyelesaikan perkara pidana lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
- Demikian pula untuk perkara Perdata dan Tipikor, kinerja penyelesaian perkara yang dicapai lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya.

➤ Pencapaian yang baik ini tidak terlepas dari kebijakan pimpinan dalam berupaya menerapkan SOP Penyelesaian Perkara sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018, di mana majelis hakim diberi tenggat waktu untuk mempelajari berkas selama 7 hari (untuk perkara pidana) dan 14 hari (untuk perkara perdata). Jangka waktu yang ditentukan dalam SOP ini jauh lebih cepat dari yang ditetapkan dalam SEMA nomor 2 tahun 2014, yaitu jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

**Indikator kinerja ke-3: Persentase penurunan sisa perkara**

Indikator ini untuk mengukur perbandingan antara selisih sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun ini dibandingkan dengan tunggakan perkara tahun lalu.

$$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$$

T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan  
 T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya

**Catatan:**

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Tabel 9. Persentase penurunan sisa perkara

Tahun	Perkara	Sisa perkara tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	12	10	-20%	80%	-25%
	Perdata	21	28	25%	80%	31%
	Tipikor	0	1	100%	80%	125%
2018	Pidana	10	10	0%	80%	0%
	Perdata	28	39	28,2%	80%	35,2%
	Tipikor	1	2	50%	80%	62,5%
2017	Pidana	10	19	47%	70%	67%
	Perdata	39	31	-26%	70%	-37%
	Tipikor	2	0	0%	70%	0%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

Di tahun 2019, hanya perkara tipikor yang bisa melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan perkara pidana dan perdata belum bisa mencapai target dikarenakan banyaknya jumlah perkara yang masuk di akhir bulan November dan Desember tahun 2019, yaitu sebesar 12 perkara pidana yang masuk di bulan Desember 2019, serta 22 perkara perdata yang masuk di November 2019 dan 15 perkara perdata yang masuk di Desember 2019. Hal ini pula yang menjadi penyebab tentatifnya capaian target di setiap tahunnya termasuk jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Sebab perkara yang menjadi sisa biasanya adalah perkara yang masuk di bulan Desember.

## Indikator kinerja ke-4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator kinerja ini diukur dengan cara membandingkan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara.

Indikator kinerja ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan.

Tabel 10. Data perkara yang mengajukan upaya hukum selama tahun 2019

Perkara	Pengadilan Negeri	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi		Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	
		Jumlah per PN	Total sewilayah PT Banten	Jumlah per PN	Total sewilayah PT Banten
Pidana	PN Tangerang	57	83	8	15
	PN Serang	22		3	
	PN Pandeglang	4		-	
	PN Rangkasbitung	-		-	
Perdata	PN Tangerang	94	116	23	84
	PN Serang	16		7	
	PN Pandeglang	2		-	
	PN Rangkasbitung	4		2	
Tipikor	PN Serang	3	3	3	3
Total		202	202	99	99

Tabel 11. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Realisasi	Target	Capaian
2019	Kasasi	96	298	32%	40%	80%
	PK	199	298	67%	85%	79%
2018	Kasasi	262	314	83,4%	63%	132%
	PK	297	314	94,6%	45%	210%
2017	Kasasi	182	287	63,4%	62%	102%
	PK	263	287	91,6%	40%	229%

Dari tabel di 11 dapat disimpulkan bahwa :

- Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Pada tahun 2019 capaian kinerja mencapai 80%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 32%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan merasa sedikit puas atas putusan tingkat banding. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya di mana capaian kinerja melampaui target, namun pada tahun 2019 ini tidak demikian karena pada triwulan I tahun 2019 telah dilakukan reviu terhadap matriks renstra dari sisi anggaran dan target yang disesuaikan dengan trend (kecenderungan) data perkara yang mengajukan kasasi dan PK.

- Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali :  
Pada tahun 2019 capaian kinerja mencapai 79%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 67%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan merasa cukup puas atas putusan tingkat kasasi, sehingga pencari keadilan yang mengajukan Peninjauan Kembali lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengajukan.
- Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (2018 dan 2017), terjadi penurunan kinerja di tahun 2019 karena pada tahun 2019 lebih banyak pencari keadilan yang mengajukan kasasi dan PK. Hal ini bisa saja terjadi karena semakin mudahnya akses untuk beracara di peradilan dan meningkatnya transparansi sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung sehingga keinginan pencari keadilan untuk mengajukan kasasi dan PK meningkat.

### ● **Indikator kinerja ke-5: Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi**

Indikator kinerja ini untuk mengukur Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Tabel 12. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi**

Tahun	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Target	Capaian Kinerja
2019	88,56	90	98,4%
2018	83,49	90	92,8%
2017	80	88	90,9%

Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi pada tahun 2019 sebesar 88,56, sedangkan target yang ditetapkan adalah 90, sehingga capaian kinerjanya di tahun 2019 adalah 98,4%. Terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2017 dan tahun 2018. Sejak tahun 2018, pengukuran indeks responden ini berada pada kategori "sangat baik" (pada interval 81,26- 100). Hal ini mencerminkan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Banten semakin baik dari tahun ke tahun.



## Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

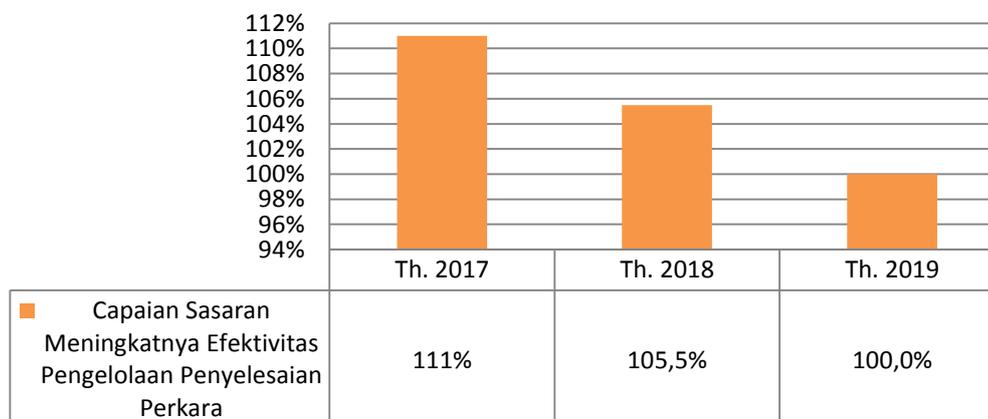
Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke majelis, diminutasi dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, serta mengukur putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 13. Sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
1. Pidana	111%	111%	100%
2. Perdata	111%	111%	100%
3. Tipikor	nihil	111%	100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	nihil	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	111%	108%	100%

Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Meskipun dilihat dari tabel 13 dan grafik 3 terjadi trend penurunan capaian kinerja di tahun 2019, namun hal tersebut bukan dikarenakan kinerja yang tidak baik. Tetapi lebih dikarenakan pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Banten melakukan reviu renstra terhadap target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kecenderungan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Bukti bahwa tidak sebenarnya tidak terjadi penurunan kinerja dapat dilihat dari capaian kinerja yang sepenuhnya mencapai 100%.

### Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

#### ● Indikator kinerja ke-1: Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan (diputus dan diminutasi/ dikirim ke pengadilan pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu. Indikator ini untuk mengukur waktu dalam penyelesaian perkara.

Tabel 14. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah putusan dalam tahun berjalan	Jumlah putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	119	119	100%	100%	100%
	Perdata	171	171	100%	100%	100%
	Tipikor	8	8	100%	100%	100%
2018	Pidana	110	110	100%	90%	111%
	Perdata	191	191	100%	90%	111%
	Tipikor	13	2	100%	90%	111%
2017	Pidana	120	120	100%	90%	100%
	Perdata	167	167	100%	90%	100%
	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	90%	Nihil

Dari tabel di atas dapat disimpulkan :

Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju untuk tahun 2019 selalu tepat waktu sesuai dengan prosedur yang ada yaitu tidak lebih dari 3 hari sejak putus sehingga tahun 2019 capaiannya 100% karena target yang ditetapkan 100%. Dan tidak ada perbedaan yang berarti dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara telah memenuhi standar waktu (standar operasional prosedur) yang ditetapkan.

**Indikator kinerja ke-2 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus**

Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.

Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

**Tabel 15. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus**

Tahun	Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah putusan perkara	Realisasi	Target	Capaian
2019	Tipikor	8	8	100%	100%	100%
2018	Tipikor	12	12	100%	100%	100%
2017	Tipikor	nihil	nihil	nihil	100%	nihil%

Dari tabel 14 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Perkara yang menarik perhatian masyarakat bukan hanya ditinjau dari jenis perkara saja, melainkan juga dari kasus tertentu yang menjadi perhatian masyarakat. Pada tahun 2019, perkara yang menarik perhatian masyarakat di Pengadilan Tinggi Banten hanya perkara Tipikor.
- Pada tahun 2019 dan 2018 capaiannya mencapai 100% karena semua perkara tipikor yang masuk diputus pada tahun berjalan tersebut dan kesemuanya segera setelah 1 hari diputus langsung dapat diakses secara online.
- Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah nihil, ini dikarenakan pada tahun 2017 untuk perkara Tindak Pidana Korupsi masuk 2 perkara pada akhir tahun 2017 dan belum diputus pada tahun tersebut.
- Berdasarkan pengukuran tersebut bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Banten pada indikator ini dikatakan baik.

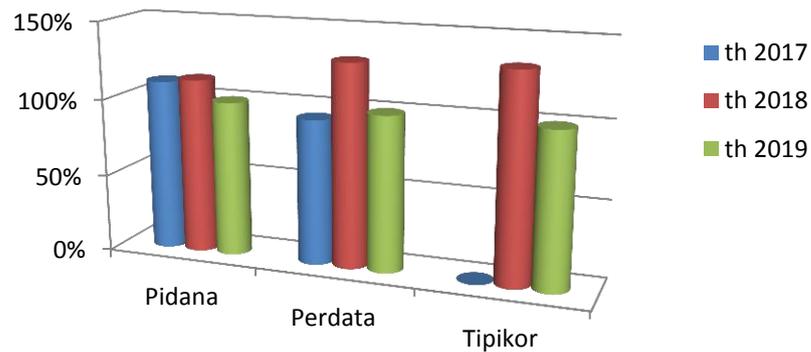
**Sasaran 3 : Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.**

Sasaran strategis ke-3 (ketiga) kinerja Pengadilan Tinggi Banten adalah "Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel". Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, terdapat 1(satu) indikator yang akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 16. Sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP			
1. Pidana	110,5%	102%	100%
2. Perdata	93,6%	103%	103%
3. Tipikor	nihil	113%	111%
Rata-rata capaian Sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	102,5%	106%	105%

**Grafik 4. Capaian sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana,**



Dari tabel 15 dan grafik 4 menunjukkan bahwa capaian sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel di tahun 2019 sudah baik, karena mampu mencapai 100%.

## Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

### ● Indikator kinerja ke-1: Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP.

Indikator ini untuk mengukur transparansi dan akuntabel data perkara yang diproses, sehingga mudah di akses oleh para pencari keadilan.

Tabel 17. Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP

Tahun	Perkara	Jumlah perkara tahun berjalan yang diputus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	Realisasi	Target	Capaian
2019	Pidana	109	121	90%	90%	100%
	Perdata	148	160	93%	90%	103%
	Tipikor	7	7	100%	90%	111%
2018	Pidana	100	120	83%	81%	102%
	Perdata	152	180	84%	81%	103%
	Tipikor	11	12	92%	81%	113%
2017	Pidana	94	105	89,5%	81%	110,5%
	Perdata	125	165	75,8%	81%	93,6%
	Tipikor	Nihil	2	Nihil	81%	Nihil

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Pada tahun 2019 secara keseluruhan jumlah perkara yang di putus di SIPP Pengadilan Tinggi Banten sebanyak 264 perkara sedangkan untuk perkara yang diregister di SIPP 288 perkara.
- Capaian realisasi perkara banding di Pengadilan Tinggi Banten yang di proses pada SIPP tahun 2019 mencapai target rata-rata 105% ( pidana 100%, perdata 103% dan tipikor 111%), capaian ini tidak berbeda jauh dibanding dengan capaian 2 tahun sebelumnya yakni 2017 mencapai 102,5% dan tahun 2018 capaiannya 106%. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Banten dalam menyelesaikan proses perkara di SIPP karena semua target yang ditetapkan dalam penyelesaian perkara banding di SIPP tercapai.

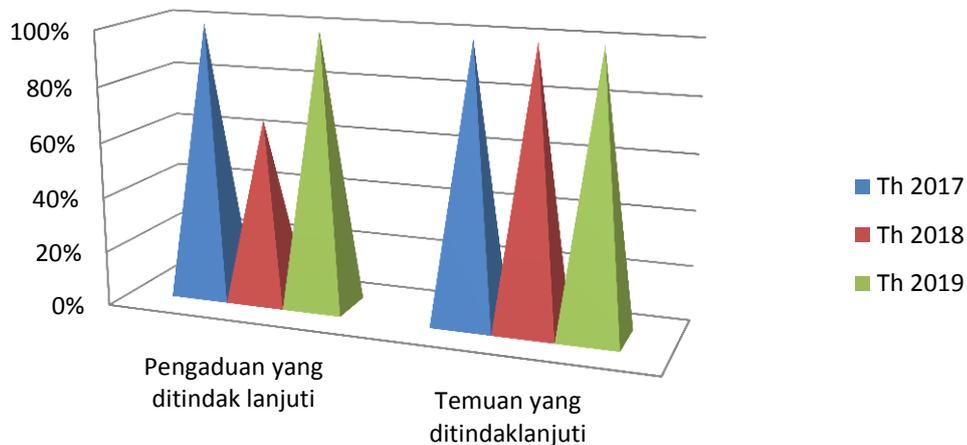
**Sasaran 4 : T erwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal**

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Banten secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Tabel 18. Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	66,6%	100%
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	100%	83,3%	100%

Grafik 5. Capaian Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal



Dari tabel 18 dan grafik 5 di atas bahwa capaian sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal pada tahun 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan.

## Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

### ● Indikator kinerja ke-1: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Tabel 19. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah pengaduan yang diterima	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2019	6	6	-	100%	100%	100%
2018	3	2	1	67%	100%	67%
2017	19	19	-	100%	100%	100%

Penjelasan dari tabel di atas adalah :

- Pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2019 sejumlah 6 pengaduan
- Dari 6 pengaduan tersebut dirinci sebagai berikut :
  1. Diteruskan ke Badan Pengawasan MA sebanyak 5 pengaduan.
  2. Ditangani oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan membentuk Tim pemeriksa nihil.
  3. Pengaduan yang didelegasikan / diminta klarifikasi ke PN sebanyak 1 pengaduan.
  4. Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ke Bawas MA, tetapi sudah selesai pada Pengadilan Tinggi nihil.
  5. Pengaduan yang selesai ditangani LHP telah disampaikan ke Bawas MARI nihil.
- Jumlah pengaduan di tahun 2019 sebanyak 6 pengaduan ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi lebih sedikit dibandingkan pengaduan pada tahun 2017, yang berarti bahwa aparatur peradilan umum wilayah Banten yang diadukan di tahun 2019 lebih sedikit dibanding yang diadukan pada tahun 2017. Dan untuk capaian kinerja dalam proses penyelesaiannya pada tahun 2019 mencapai 100%, yang berarti bahwa semua pengaduan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

## Indikator kinerja ke-2 : Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil audit internal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit Pengadilan Tinggi Banten.

Tabel 20. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah temuan yang dilaporkan	Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang belum selesai ditindaklanjuti	Realisasi	Target	Capaian
2019	5	5	-	100%	100%	100%
2018	5	5	-	100%	100%	100%
2017	34	34	-	100%	100%	100%

Penjelasan dari tabel di atas adalah:

- Capaian presentase temuan yang ditindaklanjuti tahun 2019 sesuai pada data yaitu 100%. Hal ini menunjukkan semua temuan telah ditindaklanjuti.
- Pelaksanaan audit internal yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten, yaitu pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2019, dilakukan Audit internal oleh TIM Audit Pengadilan Tinggi Banten.
- Selain itu, Pengadilan Tinggi Banten juga melaksanakan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pengawasan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni dilaksanakan pada bulan Juli dan November Tahun 2019.

Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dilaksanakan terhadap :

1. Manajemen Peradilan
2. Kinerja Dan Pelayanan Publik
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi Perkara
5. Pemeriksaan Administrasi Umum
6. Pemeriksaan Bagian Umum dan Keuangan



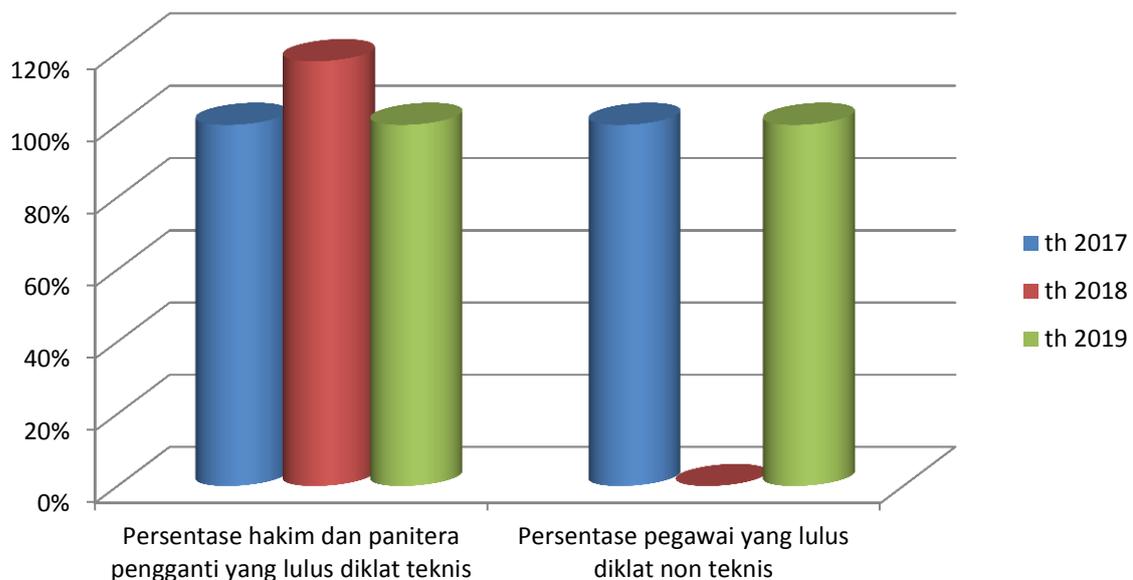
## Sasaran 5 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Banten untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan.

Tabel 21. Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase hakim dan panitera pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100%	117,6%	100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	nihil	100%
Rata-rata capaian Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	100%	117,6%	100%

Grafik 6. capaian Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

**Indikator kinerja ke-1: Persentase hakim dan panitera pengganti yang lulus diklat teknis yudisial**

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah Hakim dan Panitera yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Tabel 22. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus Diklat Teknis Yudisial

Tahun	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti	Jumlah peserta yang lulus	Realisasi	Target	Capaian
2019	4	4	100%	100%	100%
2018	1	1	100%	100%	100%
2017	5	5	100%	100%	100%

Sesuai data pada Tabel. 22, realisasi persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2019 dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan pengelolaan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia bidang teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2019 dapat dikatakan baik. Demikian pula jika dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2017 dan 2018, maka kinerjanya sama dan sudah merupakan upaya maksimal yang dapat dicapai.

Kegiatan diklat yang diikuti pada tahun 2019 adalah :

- Diklat Terpadu SPPA (1 peserta);
- Diklat Terpadu Mineral dan Batubara (1 peserta);
- Diklat Terpadu Illegal Fishing (1 peserta);
- Diklat Sistem Peradilan Anak Terpadu (1 peserta).

**Indikator kinerja ke-2: Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial**

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Tabel 23. Persentase pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial

Tahun	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti	Jumlah peserta yang lulus	Realisasi	Target	Capaian
2019	14	14	100%	100%	100%
2018	nihil	nihil	nihil	100%	nihil
2017	5	5	100%	100%	100%

Sesuai data pada Tabel. 23, realisasi persentase pegawai yang lulus diklat non teknis pada tahun 2019 dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan pengelolaan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia bidang nonteknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2019 dapat dikatakan baik. Demikian pula jika dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2018, maka kinerjanya sama dan sudah merupakan upaya maksimal yang dapat dicapai.

Kegiatan diklat yang diikuti pada tahun 2019 adalah :

- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (4 peserta);
- Diklat Protokol Tingkat Manajerial Tahun 2019 (2 peserta);
- Diklat Manajemen ASN (1 peserta);
- Diklat Manajemen Pengadilan Tingkat Lanjut (3 peserta);
- Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran (1 peserta);
- Diklat Struktural Kepemimpinan Tk. III (1 peserta)
- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (2 peserta).

Selain melalui keikutsertaan aparatur pengadilan dalam diklat teknis dan nonteknis, dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia di lingkungannya, Pengadilan Tinggi Banten juga rutin melaksanakan pembinaan/ bimbingan teknis bagi pegawai teknis dan non teknis setiap tahunnya yang juga merupakan bentuk pengelolaan SDM peradilan. Adapun kegiatan pembinaan/ bimbingan teknis di tahun 2019 sebagai berikut :

1. Bimtek Kepegawaian
2. Bimtek Korwil (Koordinator Wilayah)

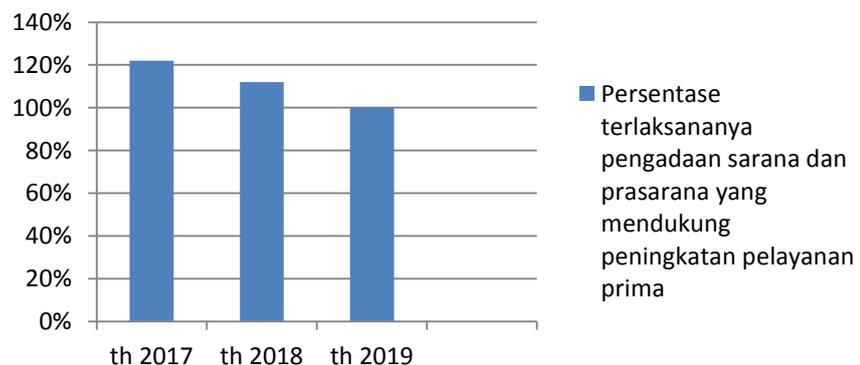
**Sasaran 6 : Meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan, secara akuntabel, efektif dan efisien**

Sasaran ini untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima, yaitu terstandarisasinya sarana dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang terdiri peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap tak berwujud.

Tabel 24. Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun		
	2017	2018	2019
a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.	122%	112%	100%
Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	122%	112%	100%

**Grafik 7. Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien**



**Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :**

**Indikator kinerja ke-1: Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan**

Indikator ini merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator ini untuk mengukur realisasi pemakaian anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam hal peningkatan dukungan layanan manajemen terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan yang telah sesuai dengan prototype atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (kebutuhan pelayanan terpadu satu pintu dan kebutuhan peralatan fasilitas kantor lainnya).

Tabel 25. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Tahun	Jumlah pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Realisasi	Target	Capaian
2019	142.000.000	141.994.400	100%	100%	100%
2018	685.000.000	679.636.800	99,21%	86%	115%
2017	489.500.000	488.879.000	99,87%	84%	119%

Dari sisi persentase penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana tahun 2019 dapat dilihat bahwa terjadi penyerapan mencapai 100% (dengan pembulatan ke atas) dan semua output pengadaan tersebut berhasil dicapai. Adapun pengadaan barang di tahun 2019 berupa laptop untuk hakim (11 unit) dan LCD yang semuanya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, terutama e-court dan SIPP.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, meskipun dari persentase capaian menurun, namun bukan berarti kinerja indikator ini menurun. Sebab, ada perbedaan target dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dan untuk tahun 2019 telah dilakukan reviu matriks renstra di mana ada penyesuaian target dengan memperhatikan kecenderungan capaian tahun-tahun sebelumnya.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dipa 01 sebesar Rp. 18.755.008.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena untuk menutupi pagu minus pada belanja pegawai sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 24.949.024.000,-
2. Dipa 03 sebesar Rp. 165.284.000,-

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi untuk Dipa 01 Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.24.831.922.298,- atau sebesar 99,53%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Dipa 01 Pengadilan Tinggi Banten sebesar 99,7% pada tahun 2019 mengalami penurunan namun tidak signifikan.

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi untuk Dipa 03 Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.161.953.965,- atau sebesar 97,99%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Dipa 03 Pengadilan Tinggi Banten sebesar 96,2%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan.

Perbandingan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Banten secara lebih jelas terlihat pada grafik dan tabel berikut :

**Grafik 8. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran**



**Tabel 26. Persentase Realisasi Anggaran**

Tahun	Total Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
2019	Dipa 01 : 24.949.024.000 Dipa 03 : $\frac{165.284.000 +}{25.114.308.000}$	Dipa 01 : 24.831.922.298 Dipa 03 : $\frac{161.953.965 +}{24.993.876.263}$	99,52%
2018	Dipa 01 : 22.880.470.000 Dipa 03 : $\frac{139.750.000 +}{20.858.201.000}$	Dipa 01 : 20.470.478.939 Dipa 03 : $\frac{130.899.790 +}{20.601.378.729}$	99,67%
2017	Dipa 01 : 20.718.451.000 Dipa 03 : $\frac{359.106.000 +}{23.239.576.000}$	Dipa 01 : 22.818.101.930 Dipa 03 : $\frac{345.460.930 +}{23.163.562.860}$	98,77%

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 24.993.876.263,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	165.284.000	161.953.965	97,99%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	24.807.024.000	22.676.107.530	91,4%
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal			
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif			
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	142.000.000	141.994.400	100%



# BAB IV

## PENUTUP

Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana dan perdata (sesuai prosedur) dari Pengadilan Negeri sewilayah Provinsi Banten yang meliputi 8 (kota/kabupaten) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Tinggi Banten.

Perlu penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar kantor Pengadilan Tinggi Banten dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pencari keadilan.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparaturnya Mahkamah Agung RI umumnya dan Pengadilan Tinggi Banten pada khususnya.



# LAMPIRAN

- Lampiran 1 Reviu Indikator Kinerja Utama
- Lampiran 2 Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019
- Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2019
- Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 7 Pernyataan Telah Direviu
- Lampiran 8 Checklist Reviu
- Lampiran 9 SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019
- Lampiran 10 Hasil Inventarisir LKjIP Tahun 2019 Wilayah Pengadilan Tinggi Banten



**Lampiran 1 :**  
**Reviu Indikator Kinerja Utama**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <b>Catatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ <b>Catatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua,



**HARYANTO, S.H., M.H.**



**Lampiran 2 :**  
**Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019**

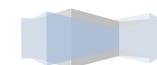
**LAMPIRAN :**

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019  
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

- Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten  
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Anggaran ( Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesaikan ditingkatkan secara tepat waktu							
					1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%				190	Perkara	247.490	110.906	90.440	180.336	108.490
					2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%				-	-	-	-	-	-	-
					3. Tipicir	100%	100%	100%	100%	100%				2	Perkara	-	-	2.670	17.940	1.794
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu															
					1. Pidana	96%	95%	100%	100%	100%				190	Perkara	247.490	110.906	90.440	180.336	108.490
					2. Perdata	80%	80%	80%	80%	80%				-	-	-	-	-	-	-
					3. Tipikor	99%	100%	100%	100%	100%				2	Perkara	-	-	2.670	17.940	1.794
					c. Persentase penurunan sisa perkara															
					1. Pidana	50%	60%	70%	80%	80%				190	Perkara	247.490	110.906	90.440	180.336	108.490
					2. Perdata	50%	60%	70%	80%	80%				-	-	-	-	-	-	-
					3. Tipikor	50%	60%	70%	80%	80%				2	Perkara	-	-	2.670	17.940	1.794

				d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :															
				• Kasasi	63%	62%	62%	63%	40%										
				• PK	40%	45%	40%	45%	85%										
				e. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	80	85	88	90	90										
2	Terwujudnya Pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	50% 50%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	85%	88%	90%	90%	100%			192	Perkara	247.490	110.906	93.110	198.276	110.284









**Lampiran 3:**  
**Rencana Kinerja Tahun 2019**

## REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

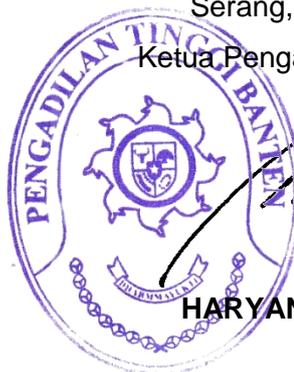
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 80% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	80% 80% 80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Kasasi 2. PK	40% 85%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	90%

4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%

Serang, 29 Maret 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



**HARYANTO, S.H., M.H.**



**Lampiran 4:**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 80% 100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	80% 80% 80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Kasasi 2. PK	40% 85%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP	90%

4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis nonyudisial	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan manjerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100%

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 18.667.508.000,-  
Rp. 87.500.000,-  
Rp. 165.284.000,-



**Lampiran 5:**  
**Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2019**

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN**

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

TAHUN ANGGARAN : 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi				*Capaian %					
			Triwulan	Triwulan				Triwulan					
			I-IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan											
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu											
		1. Pidana	100%	60,5%	68,8%	97%	91%	60,5%	69%	97%	91%		
		2. Perdata	80%	67,6%	93,2%	90%	89%	84,5%	117%	112%	89%		
		3. Tipikor	100%	100%	100%	33%	100%	100%	100%	33%	100%		
		c. Persentase penurunan sisa perkara											
		1. Pidana	80%	-50%	50%	70%	-20%	62,5%	-63%	88%	-25%		
		2. Perdata	80%	21,4%	75%	46%	25%	12,7%	94%	58%	31%		
		3. Tipikor	80%	100%	100%	-100%	100%	62,5%	125%	-125%	125%		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :											
		1. Kasasi	40%	33%	18%	30%	37%	83%	45%	75%	93%		
		2. PK	85%	77%	82%	84%	68%	91%	96%	99%	80%		

		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	Nihil	Nihil	Nihil	88,56	Nihil	Nihil	Nihil	98,4%
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu									
		1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	<b>Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi &amp; menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel</b>	a. Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP									
		1. Pidana	90%	100%	61%	95%	98,4%	111%	68%	106%	109%
		2. Perdata	90%	100%	91%	89%	105%	111%	101%	99%	116%
		3. Tipikor	90%	100%	nihil	Nihil	114%	111%	Nihil	Nihil	127%
4	<b>Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat</b>	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Nihil	100%	100%	100%	Nihil	100%	100%	100%

	<b>peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal</b>	b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	Nihil	Nihil	100%	100%	Nihil	Nihil	100%	100%
5	<b>Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif</b>	a. Persentase Hakim dan Panitera Penganti yang lulus diklat yudisial	100%	Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil	Nihil	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	Nihil	100%	100%	100%	Nihil	100%	100%
6	<b>Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntable, efektif dan efisien</b>	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	Nihil	97%	100%	100%	Nihil	97%	100%	100%

**Laporan Triwulan I  
(Januari – Maret)  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**



**Pengadilan Tinggi Banten**  
**Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002**  
**Website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id)**  
**Banten**

## I. Bagian Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	10	10	100%	100%	100%
Perdata	28	28	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan ini berdasarkan IKU poin 1.a

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

#### b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	23	38	100%	60,5%	60,5%
Perdata	46	68	80%	67,6%	84,5%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana dan perdata masing-masing sebesar 60,5% dan 84,5%. Dan untuk perkara tipikor sebesar 100%.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara	Sisa perkara tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	15	10	80%	-50%	-63%
Perdata	22	28	80%	21,4%	27%
Tipikor	0	1	80%	100%	125%

\*\* Perbandingan ini berdasarkan IKU poin LC

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara Tipikor menunjukkan bahwa capaian presentase penurunan sisa perkara yang terjadi jauh melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 125%. Untuk perkara pidana dan perdata persentase penurunan sisa perkara belum mencapai target yang sudah ditentukan yakni hanya sebesar -60% dan 27%.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Kasasi	23	69	40%	33%	83%
PK	53	69	85%	77%	91%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK hampir mencapai target yang ditetapkan yakni masing-masing sebesar 83% dan 91%.

## 2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	23	23	100%	100%	100%
Perdata	46	46	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu.

- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus sudah mencapai target yang ditetapkan.

- c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Capaian Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perkara	Jumlah perkara yang diputus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	30	30	90%	100%	111%
Perdata	46	46	90%	100%	111%
Tipikor	0	0	90%	100%	111%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP perkara pidana, perdata dan tipikor melebihi target yang telah ditetapkan yakni 111%.

- d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Periode	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang diterima	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Mar	0	0	100%	0	0

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti nihil.

Serang, 11 April 2019  
Mengetahui,  
Panitera Pengadilan Tinggi Banten



**Netti Sriningsih, S.H., M.Si**  
NIP. 195710081985032001

## II. Bagian Kesekretariatan

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti masih nihil.

b. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial masih nihil.

c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Diklat Pengadaan Barang & Jasa (PBJ)	2 org	2 org	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan 1 tahun 2019 adalah 100% (mencapai target yang sudah ditetapkan).

- d. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima  
Capaian persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada Triwulan 1 tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Uraian	Target (DIPA 2019)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 87.500.000 (100%)	0	0%

\*\* Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima bulan Januari sd Maret 2019 sebesar Rp. 0% (atau nihil).

Serang, 11 April 2019  
Mengetahui,  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten



**Ridarto, S.H., M.Si**  
NIP. 196005231982111001

**Laporan Triwulan II**  
**(Januari – Juni)**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**TAHUN 2019**



**Pengadilan Tinggi Banten**  
**Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002**  
**Website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id)**  
**Banten**

## I. Bagian Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	10	10	100%	100%	100%
Perdata	28	28	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan iniberdasarkan IKU poin I.a

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

#### b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	33	48	100%	68,8%	69%
Perdata	96	103	80%	93,2%	117%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana dan perdata masing-masing sebesar 68,8% dan 116,5%. Dan untuk perkara tipikor sebesar 100%.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara	Sisa perkara tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	15	10	80%	-50%	-63%
Perdata	7	28	80%	75%	94%
Tipikor	0	1	80%	100%	125%

\*\* Perbandingan iniberdasarkan IKU poin I.C

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara Tipikor menunjukkan bahwa capaian persentase penurunan sisa perkara yang terjadi melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 125%. Untuk perkara pidana, capaian persentase penurunan sisa perkara belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu hanya sebesar -63%. Dan untuk perkara perdata, capaian persentase penurunan sisa perkara hampir mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 94%.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Kasasi	23	130	40%	18%	45%
PK	106	130	85%	82%	96%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi belum mencapai target dan PK hampir mencapai target yang ditetapkan yakni masing 96%.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi periode bulan Januari s.d Juni 2019 tidak ada karena penilaian dilakukan 1 kali pada bulan Desember 2019.

## 2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	33	33	100%	100%	100%
Perdata	96	96	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu.

- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus sudah mencapai target yang ditetapkan.

- c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Capaian Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perkara	Jumlah perkara yang diputus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	23	38	90%	61%	68%
Perdata	68	75	90%	91%	101%
Tipikor	0	0	90%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP perkara pidana 68%, perdata melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk perkara tipikor nihil karena belum ada perkara masuk s.d akhir Juni 2019.

d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Periode	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang diterima	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Juni	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti capaiannya.

Serang, 13 Agustus 2019  
Mengetahui,  
Panitera Pengadilan Tinggi Banten



**Netti Sriningsih, S.H., M.Si**  
NIP. 195710081985032001

## II. Bagian Kesekretariatan

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti masih nihil.

b. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial masih nihil.

c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan II tahun 2019 masih nihil.

d. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Capaian persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Uraian	Target (DIPA 2019)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	100% dari Rp. 142.000.000	Rp. 137.494.400 (97%)	97%

\*\* Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima bulan Januari sd Juni 2019 sebesar 97%. Sisa anggaran yang terserap merupakan efisiensi karena output sudah dihasilkan sesuai perencanaan.

Serang, 13 Agustus 2019  
Mengetahui,  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten



**Ridarto, S.H., M.Si**  
NIP. 196005231982111001

**Laporan Triwulan III  
(Januari – September)  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**



**Pengadilan Tinggi Banten**  
**Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002**  
**Website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id)**  
**Banten**

## I. Bagian Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	10	10	100%	100%	100%
Perdata	28	28	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan ini berdasarkan IKU poin 1.a

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

#### b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	96	99	100%	97%	97%
Perdata	130	145	80%	90%	112%
Tipikor	1	3	100%	33%	33%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana dan perdata masing-masing sebesar 97% dan 111%. Dan untuk perkara tipikor sebesar 33%. Namun demikian, jumlah perkara yang belum diselesaikan belum melampaui batas maksimal penyelesaian perkara, yaitu maksimal 3 bulan.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara	Sisa perkara tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	3	10	80%	70%	88%
Perdata	15	28	80%	46%	58%
Tipikor	2	1	80%	-100%	-125%

\*\* Perbandingan iniberdasarkan IKU poin I.C

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara Tipikor menunjukkan bahwa capaian persentase penurunan sisa perkara yang terjadi minus dikarenakan ada perkara yang baru masuk di akhir triwulan 3. Untuk perkara pidana, capaian persentase penurunan sisa perkara hampir mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 88%. Dan untuk perkara perdata, capaian persentase penurunan sisa perkara belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 58%.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Kasasi	68	227	40%	30%	75%
PK	191	227	85%	84%	99%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi belum mencapai target dan PK hampir mencapai target yang ditetapkan yakni masing 99%.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi periode bulan Januari s.d September 2019 tidak ada karena penilaian dilakukan 1 kali pada bulan Desember 2019.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	96	96	100%	100%	100%
Perdata	130	130	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu.

- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus sudah mencapai target yang ditetapkan.

- c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Capaian Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perkara	Jumlah perkara yang diputus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	97	102	90%	95%	106%
Perdata	137	154	90%	89%	99%
Tipikor	0	2	90%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP perkara perdata 99%, pidana melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk perkara tipikor nihil karena belum ada perkara yang diputus s.d akhir September 2019.

d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

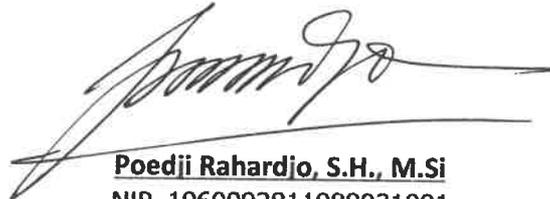
Tabel 8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Periode	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang diterima	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Juni	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti capaiannya.

Serang, 4 November 2019  
Mengetahui,  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten



**Poedji Rahardjo, S.H., M.Si**  
NIP. 1960092811988031001

## II. Bagian Kesekretariatan

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan	Target	Realisasi**	Capaian
5	5	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti masih nihil.

b. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial masih nihil.

c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
1. Diklat PBJ	4	4	100%	100%	100%
2. Diklat Protokol	1	1	100%	100%	100%
3. Diklat Manajemen ASN	1	1	100%	100%	100%
4. Diklat Manajemen Pengadilan Tingkat Lanjut	2	2	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan III tahun 2019 adalah 100%.

d. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Capaian persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada Triwulan III tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Uraian	Target (DIPA 2019)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	100% dari Rp. 142.000.000	Rp. 141.994.400 (100%)	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima bulan Januari sd September 2019 sebesar 100% (pembulatan).

Serang, 4 November 2019  
Mengetahui,  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten



**Ridarto, S.H., M.Si**  
NIP. 196005231982111001

**Laporan Triwulan IV  
(Januari – Desember)  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**



**Pengadilan Tinggi Banten  
Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002  
Website: [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id)  
Banten**

## I. Bagian Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan sasaran-sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

#### a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	10	10	100%	100%	100%
Perdata	28	28	100%	100%	100%
Tipikor	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan iniberdasarkan IKU poin I.a

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

#### b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	119	131	100%	91%	91%
Perdata	171	192	80%	89%	89%
Tipikor	8	8	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana dan perdata masing-masing sebesar 91% dan 89%. Dan untuk perkara tipikor sebesar 100%.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan II tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara	Sisa perkara tahun berjalan	Sisa perkara tahun sebelumnya	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	12	10	80%	-20%	-25%
Perdata	21	28	80%	25%	31%
Tipikor	0	1	80%	100%	125%

\*\* Perbandingan iniberdasarkan IKU poin I.C

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara Tipikor menunjukkan bahwa capaian persentase penurunan sisa perkara yang terjadi melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 125%. Untuk perkara pidana, capaian persentase penurunan sisa perkara belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu hanya sebesar -20%. Dan untuk perkara perdata, capaian persentase penurunan sisa perkara dibawah target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 31%.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Kasasi	111	298	40%	37%	93%
PK	203	298	85%	68%	80%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 93% dan PK belum mencapai mencapai target yang ditetapkan yakni baru mencapai 80%.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi periode bulan Januari s.d Desember 2019 sebesar 88,56 berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada Interval 81,26 – 100,00).

Capaian Target Indeks Responden adalah =  $\frac{88,56}{90} = 98,4\%$

"Persentase Capaian Target = perbandingan indeks responden dengan target yang ditetapkan".

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	119	119	100%	100%	100%
Perdata	171	171	100%	100%	100%
Tipikor	8	8	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu.

- b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus  
 Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Tipikor	8	8	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus sudah mencapai target yang ditetapkan.

- c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP  
 Capaian Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perkara	Jumlah perkara yang diputus di SIPP	Jumlah perkara yang diregister di SIPP	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	119	121	90%	98,4%	109%
Perdata	168	160	90%	105%	116%
Tipikor	8	7	90%	114%	127%

\*\* Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang diregister di SIPP

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP perkara pidana 109%, perdata melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 116%. Sedangkan untuk perkara tipikor 127% melebihi target yang telah ditetapkan

d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Periode	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang diterima	Target	Realisasi**	Capaian
Jan – Desember 2019	6	6	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti capaiannya.

Serang, 28 Januari 2020  
Mengetahui,  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten

  
**Poedji Rahardjo, S.H., M.Si**  
NIP. 19600928 119880 3 001

## II. Bagian Kesekretariatan

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2019 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan	Target	Realisasi**	Capaian
5	5	100%	Nihil	Nihil

\*\* Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti masih nihil.

b. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
Diklat Terpadu SPPA	1	1	100%	100%	100%
Diklat Terpadu Mineral dan Batubara	1	1	100%	100%	100%
Diklat Terpadu Illegal Fishing	1	1	100%	100%	100%
Diklat Sistem Peradilan Anak Terpadu	1	1	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial mencapai 100% dengan total peserta diklat 4 orang

c. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Nama Diklat	Jumlah Peserta	Peserta Lulus Diklat	Target	Realisasi**	Capaian
1. Diklat PBJ	4	4	100%	100%	100%
2. Diklat Protokol Tingkat Manajerial Tahun 2019	2	2	100%	100%	100%
3. Diklat Manajemen ASN	1	1	100%	100%	100%

4. Diklat Manajemen Pengadilan Tingkat Lanjut	3	3	100%	100%	100%
5. Diklat Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	1	1	100%	100%	100%
6. Diklat Struktural Kepemimpinan Tk. III	1	1	100%	100%	100%
7. Diklat Kepemimpinan Tk.IV	2	2	100%	100%	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah peserta yang lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada Triwulan IV tahun 2019 sebesar 100% dengan total peserta diklat 14 orang.

- d. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Capaian persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima pada Triwulan IV tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

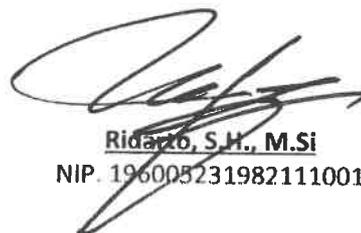
Tabel 12. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Uraian	Target (DIPA 2019)	Realisasi	Persentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	100% dari Rp. 142.000.000	Rp. 141.994.000 (100%)	100%

\*\* Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian penyerapan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima bulan Januari sd Desember 2019 sebesar Rp. 100% (pembulatan)

Serang, 28 Januari 2019  
Mengetahui,  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten



Ridarto, S.H., M.Si  
NIP. 196005231982111001



**Lampiran 6:**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2019**

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase Perkara Banding yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100% 80% 100%	90,8% 89,1% 100%	90,8% 111% 100%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	80% 80% 80%	-20% 25% 100%	-25% 31% 125%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Kasasi 2. PK	40% 85%	32% 37%	80% 79%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90	88,56	98,4%
		Rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding 82,5%			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 100%					
3.	Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi yang terintegritas & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	90% 90% 90%	90% 93% 100%	100% 103% 111%
Rata-rata capaian Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi yang terintegritas & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 105%					

4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal 100%					
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif 100%					
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien 100%					
<b>Total Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019 97,9%</b>					



Lampiran 7:  
**Pernyataan Telah Direviu**

# PERNYATAAN TELAH DIREVIU

## PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



HARYANTO, S.H., M.H.



**Lampiran 8:**  
**Checklist Reviu**





**Lampiran 9:**  
**SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2019**



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**NOMOR W29.U/15/KPT/SK/KP.10.10/II/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2019.**

- Kesatu** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten Taun 2019;
- Kedua** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten bertugas untuk:
1. Mengumpulkan, menginventaris dan mengolah data-data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut;
  2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten;
  3. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
  4. Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 19 Januari 2020

**KETUA,**

  
HARYANTO, S.H., M.H.

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor : W29.U/K/KPT/SK/KP.10.10/2020

Tanggal : Februari 2020

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2019**

**PEMBINA**

- : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten  
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

**KETUA**

: Panitera

**WAKIL KETUA**

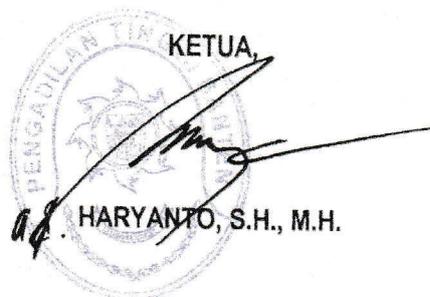
: Sekretaris

**SEKRETARIS**

: Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

**ANGGOTA-ANGGOTA**

- : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian  
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan  
3. Panitera Muda Pidana  
4. Panitera Muda Khusus Tipikor  
5. Panitera Muda Hukum  
6. Panitera Muda Perdata  
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan  
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

  
KETUA,  
HARYANTO, S.H., M.H.



## Lampiran 10:

Hasil Inventarisis LKjIP Tahun 2019 wilayah  
Pengadilan Tinggi Banten

## HASIL INVENTARISIR SAKIP 2019 WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	SATKER	TANGGAL DITERIMA	LKJIP 2018		IKU	RENSTRA 2015- 2019	RKT			PKT		Sudah dimasukan ke Website Satker
			HARDCOPY	SOFTCOPY			2019	2020	2021	2019	2020	
1	PN TANGERANG	24 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	PN SERANG	18 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	PN PANDEGLANG	24 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	PN RANGKASBITUNG	24 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ = Sudah Mengirimkan

X = Belum Mengirimkan